

POPULISME DALAM KAMPANYE: ANALISIS PERAN ANIES BASWEDAN DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI PADA PILPRES 2024

Zahidah Dina Firdausi¹, Yusa Djuyandi²

¹Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Email: zahidah23001@mail.unpad.ac.id

Submitted: 07-07-2023; Accepted: 04-08-2024; Published : 04-08-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan populisme dalam kampanye politik melalui sosok Anies Baswedan dan dampaknya terhadap peningkatan elektabilitas partai-partai Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi strategi partai dalam mengukung Anies Baswedan yang membawa narasi populisme serta bagaimana strategi ini mempengaruhi dukungan publik terhadap partai pengusungnya, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilumpulkan melalui laporan media massa, hasil survei, dan dokumen partai. Analisis menunjukkan bahwa strategi populisme yang diterapkan oleh Anies Baswedan, yang berfokus pada kritik terhadap kebijakan pemerintah dan promosi narasi perubahan, berhasil menarik dukungan luas dari masyarakat. Temuan ini diindikasikan oleh peningkatan signifikan dalam perolehan kursi DPR dan DPRD oleh partai-partai pengusungnya, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi partai dalam mengukung narasi populisme melalui sosok Anies Baswedan berhasil meningkatkan elektabilitas partai-partai pengusungnya secara signifikan, meskipun koalisi tersebut tidak memenangkan pilpres. Penelitian ini menyoroti efektivitas populisme sebagai strategi politik dalam konteks elektoral.

Kata kunci: Kampanye Politik; Populisme; Strategi Politik; Strategi Partai; Pilpres

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of populism in political campaigns through the figure of Anies Baswedan and its impact on increasing the electability of the Coalition of Change parties in the 2024 presidential election. Using a qualitative approach, this research explores the party's strategy in endorsing Anies Baswedan who carries a populist narrative and how this strategy affects public support for the endorsing parties, namely Nasdem, PKS, and PKB. The research uses secondary data collected through mass media reports, survey results, and party documents. The analysis shows that the populist strategy implemented by Anies Baswedan, which focused on criticizing government policies and promoting a narrative of change, succeeded in attracting widespread support from the public. This finding is indicated by the significant increase in the acquisition of DPR and DPRD seats by his supporting parties, namely Nasdem, PKS, and PKB. The results showed that the party's strategy in carrying the populist narrative through the figure of Anies Baswedan succeeded in significantly increasing the electability of its supporting parties, even though the coalition did not win the presidential election. This research highlights the effectiveness of populism as a political strategy in the electoral context..

Keywords: Political Campaign; Populism; Political Strategy; Party Strategy; Presidential Election

PENDAHULUAN

Populisme telah menjadi fenomena politik yang semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam konteks kampanye

elektoral (Mudde, 2017). Penggunaan populisme sebagai strategi kampanye semakin sering dijumpai dalam berbagai kontestasi politik di seluruh dunia. Bagaimana tidak, populisme menjadi pendekatan politik yang pas untuk meraih dukungan masyarakat,

terutama masyarakat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah yang tengah berlangsung. Sebagaimana makna dari populisme itu sendiri yang dapat didefinisikan sebagai pendekatan politik yang membedakan masyarakat menjadi dua kelompok homogen yang antagonistik, yaitu "rakyat" versus "elite," dan mengklaim bahwa populis adalah satu-satunya perwakilan kehendak rakyat (Mudde, 2004).

Populisme sering dimanfaatkan dalam gerakan politik untuk menggalang dukungan rakyat dan menantang status quo. Dengan retorika yang menekankan konflik antara rakyat biasa dan elit, populisme dapat menggerakkan emosi dan memobilisasi dukungan luas. Populisme sering kali digunakan oleh gerakan politik yang merasa diabaikan oleh institusi politik tradisional dan mencari perubahan radikal. Sebagai contoh, gerakan politik seperti Brexit di Inggris dan gerakan anti-korupsi di berbagai negara sering menggunakan narasi populis untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa dirugikan oleh globalisasi atau korupsi elit (Moffitt, 2016).

Pendekatan populisme ini seringkali digunakan secara pragmatis oleh para politisi untuk memenangkan pemilu dengan mengeksploitasi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elite yang berkuasa (Moffitt, 2016). Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan populisme dalam kampanye politik dapat meningkatkan elektabilitas kandidat dan partai politik. Misalnya, penelitian oleh Mudde dan Kaltwasser (2017) menunjukkan bahwa populisme dapat berfungsi sebagai strategi efektif untuk menarik dukungan pemilih yang merasa tidak terwakili oleh elite politik.

Di Indonesia, isu populisme juga menjadi semakin dominan dalam strategi kampanye politik. Pilpres 2024 menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji. Dalam Pilpres Indonesia 2024, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan PKB mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Koalisi ini dikenal dengan upayanya menggembar-gemborkan narasi perubahan dan menghadirkan alternatif politik yang berbeda dari pemerintahan saat ini. Dalam konteks strategi politik, penggunaan isu populisme memang tampak menonjol dalam kampanye mereka.

Anies Baswedan sendiri sering dikaitkan dengan isu populisme. Populisme, dalam konteks politik, biasanya mencakup narasi yang mengangkat permasalahan rakyat biasa melawan elit yang dianggap korup atau tidak efektif. Anies

telah beberapa kali menonjolkan dirinya sebagai pembawa perubahan dan pembela kepentingan rakyat biasa, sesuatu yang sangat khas dalam retorika populis.

Contohnya dalam penelitian yang menganalisis populisme Anies saat menjadi Gubernur DKI, Anies menentang relokasi dan menganggapnya sebagai penindasan yang merugikan rakyat. Ia juga mengedepankan egalitarianism dengan membuat narasi dan janji untuk menciptakan keadilan bagi semua warga Jakarta, khususnya mereka yang terdampak relokasi (Gunawan & Paramita, 2023). Kampanye-kampanye Anies sering kali menekankan isu-isu seperti keadilan sosial, reformasi birokrasi, dan penghapusan korupsi, yang semuanya merupakan tema sentral dalam wacana populis (Kompas, 2024).

Pemilihan Anies Baswedan, yang bukan merupakan kader partai, oleh Koalisi Perubahan dapat dianalisis sebagai strategi politik yang pragmatis. Anies dipilih karena dianggap memiliki daya tarik populisme yang kuat, yang dapat menarik dukungan publik lebih luas dibandingkan kader partai lainnya. Kondisi pemerintahan saat ini yang banyak menimbulkan kekecewaan publik menjadi faktor penting dalam strategi ini. Anies, dengan reputasinya sebagai tokoh yang kritis terhadap pemerintah dan dekat dengan rakyat, dilihat sebagai sosok yang mampu memanfaatkan sentimen populisme untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat (Tirto.id, 2024).

Selain itu, strategi ini juga diharapkan dapat menggiring dukungan tidak hanya untuk Anies sebagai calon presiden tetapi juga untuk partai-partai pengusungnya. Narasi populisme yang dibawa oleh Anies diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas Nasdem, PKS, dan PKB dalam perolehan kursi legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana penggunaan populisme dalam kampanye politik, khususnya dalam menganalisis peran Anies Baswedan dalam meningkatkan elektabilitas partai Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024.

Pada penelitian sejenis, populisme Anies Baswedan sudah pernah diteliti oleh Lucia Marietta S dan Evi Lina Sutrisno dalam penelitiannya yang berjudul *Menjadi Pemimpin yang Ramah dan Peduli Rakyat : Melihat Populisme pada Anies Baswedan di Tengah Pandemi COVID-19*. Namun penelitian tersebut spesifik menganalisis populisme Anies hanya pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta di masa krisis pandemi COVID-19 saja. Selain itu, penelitian lainnya dilakukan oleh Savitri dkk (2024) yang menganalisis bahasa populis yang ditemukan dalam kampanye pemilu 2024 dengan judul penelitian *Bahasa Populis Dalam Kampanye Pemilu 2024: Analisis Terhadap Pidato Politik Terkini*. Namun

penelitian ini lebih berfokus pada banyaknya bahasa populis yang ditemukan dalam kampanye para kandidat Pilpres 2024, bukan berfokus pada analisis narasi populisme dan pengaruhnya.

Penelitian dari Gunawan & Paramita, (2023) juga menunjukkan bahwa Anies mengimplementasikan populisme sosial (demokratik) dalam proses kampanyenya. Dalam penelitiannya yang berjudul Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik pada Media Online melalui Perspektif Identitas Sosial, Gunawan dan Paramita lebih berfokus pada menganalisis aspek-aspek populisme pada aktor politik, terutama pada Basuki Tjahja Purnama juga Anies Rasyid Baswedan. Menariknya, penelitian tersebut mengungkap perbedaan jenis strategi populisme yang digunakan oleh Ahok dan Anies pada Pilgub DKI 2017 lalu dan jenis strategi populisme apa yang menghantarkan Anies pada kemenangan.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jenis strategi populisme yang dibawa oleh Anies adalah strategi populisme sosial (demokratik) sedangkan yang dibawa oleh Ahok adalah strategi populisme teknokratik. Dengan strategi tersebut Anies membentuk branding melalui kampanyenya sebagai pemimpin yang mengatasmakan keadilan rakyat dengan janji-janjinya. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi populisme sosial (demokratik) yang dibawa Anies berhasil menghantarkannya kepada kemenangan (Gunawan dan Paramita, 2023).

Penelitian mengenai kekuatan populisme dari sosok Anies Baswedan menjadi menarik untuk dikaji. Terlebih melihat antusiasme partai-partai Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024 yang mengusung Anies sekalipun ia bukanlah kader dari partai-partai tersebut. Maka, dalam penelitian ini sekaligus juga membuktikan bagaimana perkembangan kekuatan populisme Anies pada musim Pilpres 2024.

Penelitian ini tidak hanya meneliti narasi-narasi populisme apa saja yang dibawa Anies Baswedan pada kampanyenya, tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap hasil Pilpres juga keuntungan yang didapat oleh partai-partai pengusungnya dalam Koalisi Perubahan. Penelitian ini juga mengaitkan konsep populisme dengan strategi kemenangan dalam politik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana populisme berfungsi sebagai strategi kampanye yang efektif dalam konteks politik Indonesia yang dinamis dan kompleks, baik dalam memenangkan kandidat, maupun dalam keuntungan menaikkan elektabilitas partai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis penggunaan populisme dalam kampanye politik Koalisi Perubahan yang diangkat oleh sosok Anies Baswedan. Kemudian menganalisa bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas partai-partai Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena sosial dan politik secara komprehensif melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan eksploratif.

Metode kualitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami konteks sosial, perilaku, dan persepsi individu atau kelompok dalam situasi tertentu (Creswell, 2013). Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan dinamis, serta memberikan wawasan mendalam tentang proses dan interaksi sosial (Denzin & Lincoln, 2011). Penelitian ini memfokuskan pada analisis konten dari berbagai sumber data sekunder. Peneliti mengumpulkan data tentang bagaimana Anies Baswedan menggunakan narasi populisme dalam kampanyenya. Data-data terkait narasi populisme dikumpulkan melalui laporan media massa, hasil survey, konten pidato, wawancara, dan publikasi terkait kampanye Anies Baswedan.

Data-data tersebut kemudian divalidasi dan dianalisis menggunakan teori populisme serta dibuktikan dengan hasil survei yang mendukung data tersebut. Data survei sementara selama masa kampanye serta data perolehan akhir Pilpres (termasuk data kursi parlemen partai) menjadi data pendukung bagaimana pengaruh populisme dalam kampanye mempengaruhi elektabilitas partai-partai pengusungnya. Data-data tersebut dianalisis untuk membuktikan apakah populisme efektif sebagai strategi kampanye baik dalam memenangkan kandidat maupun dalam menaikkan elektabilitas partai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populisme dalam Kampanye

Populisme dalam kampanye politik adalah penggunaan retorika dan strategi yang menekankan kedekatan dengan rakyat biasa dan kritik terhadap elite yang dianggap tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Untuk memahami lebih lanjut, berikut beberapa elemen/ ciri utama populisme dalam kampanye politik beserta contohnya:

1. **Retorika Anti-Elite:** Kandidat populis sering menggunakan retorika yang menyerang elite politik dan ekonomi, menuduh mereka sebagai penyebab utama ketidakadilan dan ketidakpuasan rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam kampanye politik Anies Baswedan yang sering mengkritik kebijakan pemerintah dan elite yang dianggap korup dan tidak peduli pada rakyat (Moffitt, 2016).
Contoh lain dapat dilihat pada kampanye Pilpres 2014 dimana Joko Widodo menggunakan media sosial untuk membangun *framing*/ citra sebagai "pemimpin rakyat" yang dekat dengan warga biasa dan berbeda dengan elite politik tradisional (Saraswati, 2018).
2. **Narasi "Kita vs Mereka":** Kampanye populis biasanya menekankan narasi yang membedakan antara "kita" sebagai rakyat biasa yang jujur dan "mereka" sebagai elite yang korup dan tidak peduli terhadap kepentingan rakyat (Haryanto, 2019).
Contohnya Prabowo Subianto yang pada kampanyenya sering mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap lebih menguntungkan pihak asing daripada rakyat Indonesia. Kemudian kampanye Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 juga banyak menyasar pemilih dari kalangan petani dan nelayan yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah (Lim, 2017).
3. **Pesan Pro-Rakyat:** Pesan populis menekankan bahwa kandidat atau partai politik adalah satu-satunya yang benar-benar peduli terhadap kepentingan rakyat. Janji-janji kampanye sering kali berfokus pada perubahan yang akan menguntungkan rakyat banyak, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan gratis (Weyland, 2001).
Misalnya, kampanye Anies Baswedan selama Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sering menggunakan narasi tentang ketidakadilan dan kesenjangan sosial untuk menarik dukungan dari warga miskin kota (Suaedy, 2014). Contoh lainnya, Prabowo Subianto dalam kampanye Pilpres 2019 sering menggunakan narasi populis yang menekankan perlunya "kedaulatan ekonomi" dan "peningkatan kesejahteraan rakyat" (Tempo, 2019).
4. **Penggunaan Simbol dan Identitas:** Kampanye populis sering menggunakan simbol-simbol yang mudah dikenali oleh masyarakat luas, seperti bendera nasional, lagu-lagu patriotik, dan ikon budaya populer. Identitas nasional dan budaya lokal sering kali ditekankan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara pemilih (Stanley, 2008).
5. **Teknik Komunikasi Modern:** Kandidat populis sering menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan mereka dengan cepat dan luas. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan pemilih dan penyebaran pesan yang emosional dan kontroversial, yang dapat menarik perhatian lebih besar dibandingkan media tradisional (Gerbaudo, 2018).
Contohnya, selama kampanye Pilpres 2014, Joko Widodo menggunakan media sosial untuk membangun *framing*/ citra sebagai "pemimpin rakyat" yang dekat dengan warga biasa dan berbeda dengan elite politik tradisional (Saraswati, 2018).
6. **Janji Perubahan dan Pembaruan:** Kampanye populis biasanya berfokus pada janji-janji perubahan dan pembaruan yang radikal, mengklaim akan memberantas korupsi, mengurangi ketimpangan, dan memperbaiki sistem yang dianggap rusak (Wibowo, 2020). Contohnya, kampanye Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan populis yang mengkritik kebijakan pemerintah dan menyerukan perubahan (Yilmaz, 2023).
Ciri narasi populis beserta contoh di atas menunjukkan bahwa di Indonesia, populisme

telah menjadi strategi kampanye yang efektif, terutama dalam beberapa pemilu terakhir. Tak terkecuali pada Pilpres 2024, kampanye yang dibawa oleh Anies Baswedan juga merupakan salah satu contoh di mana populisme digunakan secara efektif untuk menarik dukungan masyarakat luas. Anies menggunakan retorika yang membela kepentingan rakyat kecil dan mengkritik elite yang korup. Hal ini menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi politik dan ekonomi saat ini.

Analisis Pertimbangan Strategis Partai Dibalik Pengusungan Anies

Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Perubahan memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, meskipun Anies bukan kader partai. Tentunya pengusungan Anies berdasarkan berbagai pertimbangan strategis. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada popularitas Anies, tetapi juga pada citra populisnya yang kuat, yang diharapkan dapat menarik dukungan luas dari masyarakat yang merasa terpinggirkan dan tidak puas dengan pemerintah saat ini. Populisme, yang sering membagi masyarakat menjadi dua kelompok antagonistik—"rakyat" dan "elite"—merupakan strategi yang efektif untuk menggalang dukungan massa (Mudde, 2004).

Anies Baswedan memiliki latar belakang yang menarik dan beragam, yang memperkuat posisinya sebagai calon presiden yang potensial. Sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur DKI Jakarta, Anies memiliki rekam jejak dalam pemerintahan yang cukup panjang. Selama masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia dikenal dengan berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti program rumah DP 0% dan penataan kampung-kampung kumuh (Kompas, 2024). Program-program ini menunjukkan komitmen Anies untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, sebuah citra yang sangat cocok dengan narasi populisme yang ingin diusung oleh Koalisi Perubahan.

Analisis para ahli menunjukkan bahwa partai politik sering memilih kandidat dengan daya tarik populis untuk memobilisasi pemilih yang merasa tidak terwakili oleh elite politik yang ada (Moffitt, 2016). Dalam konteks ini, Anies Baswedan dianggap mampu membawa narasi perubahan dan pembelaan terhadap rakyat yang dapat menarik perhatian pemilih yang merasa frustrasi dengan kondisi politik dan ekonomi saat ini. Dengan mengusung Anies, partai-partai dalam Koalisi Perubahan berharap dapat meningkatkan elektabilitas mereka dan memenangkan hati para pemilih yang merasa tidak puas dengan pemerintah saat ini.

Selain itu, keputusan untuk mengusung Anies Baswedan juga didukung oleh hasil berbagai survei yang menunjukkan popularitasnya yang tinggi di kalangan masyarakat (LSI, 2024). Survei-survei tersebut menunjukkan bahwa Anies memiliki daya tarik yang signifikan di mata pemilih, yang terutama merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Popularitas ini, ditambah dengan narasi populisme yang konsisten, membuatnya menjadi calon yang potensial untuk memenangkan Pilpres 2024.

Para ahli menekankan bahwa populisme sering digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap gagal memenuhi janji-janji mereka (Tarrow, 2011). Dalam hal ini, Anies Baswedan berhasil memposisikan dirinya sebagai figur oposisi yang vokal terhadap pemerintah, yang memperkuat citranya sebagai pembela rakyat. Misalnya, dalam salah satu pidato kampanyenya, Anies mengatakan, "Kita harus berdiri bersama rakyat, melawan segala bentuk ketidakadilan dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini" (Kompas, 2024). Pernyataan-pernyataan seperti ini menunjukkan bagaimana Anies menggunakan narasi populisme untuk menarik dukungan dan membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang pro-rakyat.

Anies Baswedan dan Kedekatan dengan Isu Populisme

Anies Baswedan mulai dikenal luas oleh publik Indonesia sebagai sosok yang dekat dengan isu populisme sejak masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(2014-2016) serta Gubernur DKI Jakarta (2017-2022). Kiprah dan kebijakan-kebijakan yang diambil selama menjabat di kedua posisi tersebut memperkuat citra Anies sebagai figur populis yang pro-rakyat dan berorientasi pada keadilan sosial.

Selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan memperkenalkan beberapa program yang dianggap populis dan berorientasi pada rakyat. Salah satu kebijakan populernya adalah Gerakan Indonesia Mengajar, yang bertujuan untuk mengirimkan para sarjana mengajar di daerah-daerah terpencil. Program ini mendapat apresiasi luas karena menunjukkan perhatian terhadap pemerataan pendidikan dan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Contoh kebijakan populis ini menunjukkan upaya Anies untuk menyentuh isu ketimpangan dalam sistem pendidikan, yang sejalan dengan teori populisme yang menekankan pada keadilan sosial dan perlawanan terhadap ketidakadilan struktural (Mudde, 2004).

Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta

Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin populis. Beberapa kebijakan dan program yang diimplementasikannya mencerminkan kepedulian terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang sering kali terabaikan oleh kebijakan pemerintah sebelumnya.

1. **Program KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar Plus):** Anies melanjutkan dan memperluas program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari narasi populis yang berfokus pada pemberdayaan dan keadilan sosial.
2. **Penggusuran dan Relokasi Warga:** Anies sering kali mengambil sikap yang berbeda dari pendahulunya dalam hal penanganan penggusuran warga. Ia cenderung memilih pendekatan yang lebih humanis dan berusaha mencari

solusi yang tidak merugikan warga miskin kota. Contohnya adalah penataan kampung-kampung di Jakarta yang melibatkan partisipasi warga, alih-alih menggusur mereka secara paksa.

Anies menentang relokasi dan menganggapnya sebagai penindasan yang merugikan rakyat. Ia juga mengedepankan egalitarianisme dengan membuat narasi dan janji untuk menciptakan keadilan bagi semua warga Jakarta, khususnya mereka yang terdampak relokasi (Gunawan & Paramita, 2023).

Egalitarianisme yang dilakukan oleh Anies merupakan ciri khas dari populisme. Populisme sosial terdiri dari ideologi egalitarianisme, anti-kapitalisme, yang memiliki fungsi utama dalam mendengarkan rakyat ditengah posisi rakyat yang merupakan kelompok yang dikesampingkan (Tenorio dkk, 2019).

3. **Penataan Tanah Abang:** Anies mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dengan menyediakan lahan bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mendukung ekonomi informal dan memberdayakan kelompok-kelompok ekonomi lemah.

Kebijakan-kebijakan ini memperlihatkan bagaimana sosok Anies dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyat kecil dan berjuang melawan ketidakadilan sosial. Anies sering kali menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesempatan bagi semua warga, terutama mereka yang kurang beruntung. Sikap ini mencerminkan karakteristik utama dari populisme, yaitu perjuangan untuk kepentingan rakyat biasa melawan elite yang dianggap korup dan tidak peduli pada kepentingan umum (Moffitt, 2016).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Marrieta S. & Sutrisno (2022) menyoroti populisme Anies Baswedan selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Sejak awal merebaknya COVID-19 di Wuhan, China, Anies tampil

sebagai pemimpin yang responsif dan waspada, serta fokus pada kepentingan masyarakat dalam menghadapi ancaman pandemi. Pendekatan ini berbeda dengan sikap Pemerintah Pusat yang pada mulanya tampak meremehkan situasi. Selama masa penanganan pandemi, Anies menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil melalui kebijakan-kebijakan populis, seperti distribusi masker gratis dan penyediaan akses wifi bagi seluruh warga Jakarta.

Dengan demikian, sebelum masa Pilpres 2024, Anies Baswedan sudah dikenal sebagai sosok yang dekat dengan isu populisme melalui berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikannya selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur DKI Jakarta. Kedekatan Anies dengan isu populisme tidak hanya terlihat dari retorika dan narasi yang ia gunakan, tetapi juga dari tindakan dan kebijakan nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap rakyat kecil dan upaya menciptakan keadilan sosial.

Perbandingan Narasi Populisme: Koalisi Perubahan vs. Koalisi Lainnya

Koalisi Perubahan dan Populisme

Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan PKB, dengan Anies Baswedan sebagai calon presiden, menonjol sebagai koalisi yang paling dekat dengan narasi populisme. Narasi populisme dalam konteks ini berfokus pada janji-janji perubahan dan pembaruan yang radikal, memberantas korupsi, mengurangi ketimpangan, dan memperbaiki sistem yang dianggap rusak (Wibowo, 2020). Anies Baswedan secara konsisten menekankan isu-isu ini dalam kampanyenya.

Contoh narasi populisme dari Anies Baswedan, "Kita harus mengembalikan Indonesia kepada rakyatnya, memberantas korupsi, dan menciptakan keadilan sosial bagi semua" (Kompas, 2024). "Pemerintahan harus melayani, bukan dilayani. Kita akan membangun Indonesia yang adil dan sejahtera untuk semua rakyat, bukan hanya untuk segelintir elite" (Kompas, 2024). Narasi-narasi

ini mencerminkan strategi politik yang bertujuan untuk meraih dukungan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan status quo. Anies Baswedan memposisikan dirinya sebagai oposisi yang kuat terhadap pemerintah, menggambarkan dirinya sebagai pembela rakyat.

Koalisi Prabowo dan Narasi Populisme

Koalisi yang mendukung Prabowo Subianto, yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, dan beberapa partai lainnya, juga menggunakan narasi populisme dalam kampanyenya. Prabowo sering kali berbicara tentang kebutuhan untuk memperbaiki ekonomi dan memberantas korupsi, yang merupakan tema umum dalam populisme.

Contoh narasi populisme dari Prabowo Subianto:

1. "Kita harus mengembalikan kejayaan Indonesia dengan ekonomi yang kuat dan pemerintahan yang bersih" (Tirto.id, 2024).
2. "Pemerintah harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada korporasi besar" (Tirto.id, 2024).

Meskipun narasi populisme hadir dalam kampanye Prabowo, fokusnya lebih kepada isu-isu ekonomi dan nasionalisme daripada perubahan radikal sistem pemerintahan. Prabowo juga memiliki latar belakang militer yang kuat, yang memberikannya citra sebagai pemimpin yang tegas dan disiplin, tetapi kurang menekankan pada perubahan radikal dan reformasi sosial dibandingkan Anies.

Koalisi Ganjar dan Narasi Populisme

Ganjar Pranowo, yang diusung oleh PDI-P dan beberapa partai lainnya, juga menggunakan elemen populisme dalam kampanyenya, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Narasi populisme Ganjar lebih berfokus pada keberlanjutan pembangunan dan pemberantasan korupsi di tingkat lokal.

Contoh narasi populisme dari Ganjar Pranowo:

1. "Kita akan teruskan pembangunan yang telah kita mulai, memastikan semua rakyat merasakan manfaatnya" (Kompas, 2024).

2. "Pemerintahan yang bersih dimulai dari level terendah, kita akan berantas korupsi mulai dari desa" (Kompas, 2024).

Ganjar dikenal sebagai gubernur yang berhasil dengan program-program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Namun, narasi populismenya cenderung lebih moderat dan terfokus pada keberlanjutan program-program yang telah ada, bukan pada perubahan radikal.

Mengapa Koalisi Perubahan Lebih Dekat dengan Populisme

Meskipun semua koalisi dan kandidat menggunakan elemen populisme dalam kampanye mereka, Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan menonjol sebagai yang paling kental dengan narasi populisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. **Posisi Oposisi yang Kuat:** Anies Baswedan secara konsisten memposisikan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintah, sering kali mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Ini memberikan citra sebagai pembela rakyat yang berjuang melawan elite yang korup.
2. **Retorika Perubahan Radikal:** Anies dan Koalisi Perubahan sering kali menekankan perlunya perubahan radikal dan reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan. Ini berbeda dengan narasi populisme Prabowo yang lebih nasionalistik dan Ganjar yang lebih moderat.
3. **Dukungan dari Partai-Partai yang Progresif:** PKS dan NasDem dikenal sebagai partai yang sering kali menyuarakan perubahan dan reformasi, yang sejalan dengan narasi populisme yang dibawa oleh Anies.
4. **Kekecewaan Publik terhadap Pemerintah:** Kondisi pemerintahan saat ini yang banyak menimbulkan kekecewaan publik menjadi peluang bagi Anies dan koalisinya untuk

menarik dukungan dari masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh pemerintah.

Dari beberapa factor di atas terlihat bahwa meskipun narasi populisme digunakan oleh berbagai koalisi dan kandidat dalam kampanye politik di Indonesia, Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan menonjol sebagai yang paling kental dengan elemen-elemen populisme. Hal ini disebabkan oleh posisi Anies sebagai oposisi yang kuat, retorika perubahan radikal yang dibawanya, serta dukungan dari partai-partai progresif yang mengusungnya.

Selain itu, narasi "Perubahan" yang dibawa oleh koalisi ini tentu membawa pesan yang sangat kental dengan narasi populisme. Karena kampanye populis biasanya berfokus pada janji-janji perubahan dan pembaruan yang radikal, mengklaim akan memberantas korupsi, mengurangi ketimpangan, dan memperbaiki sistem yang dianggap rusak (Wibowo, 2020).

Analisis Narasi Populis yang Dibawa Anies Baswedan

Selama kampanye Pilpres 2024, Anies Baswedan secara konsisten menggunakan narasi populisme untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Narasi populisme ini biasanya berfokus pada pembagian masyarakat menjadi dua kelompok antagonistik: "rakyat" yang dianggap terpinggirkan dan "elite" yang dianggap mengkhianati kepentingan rakyat. Anies menggunakan berbagai kesempatan untuk menegaskan posisinya sebagai wakil rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.

1. Pidato di Stadion Tenis Indoor Senayan (7 Mei 2023):

Kutipan: Dalam pidatonya, Anies Baswedan mengangkat tema besar tentang "janji kemerdekaan" dan keadilan sosial. Ia menyatakan, "Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya," yang menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Bisnis, 2023).

Analisis: Narasi ini mencerminkan karakter populis karena menekankan persatuan nasional dan kesetaraan ekonomi, serta mengkritik ketimpangan yang ada sebagai isu yang harus diselesaikan demi keadilan sosial. Populisme sering kali berfokus pada penghapusan ketidakadilan sosial dan ekonomi serta menciptakan narasi yang menghubungkan pemimpin langsung dengan rakyat (Mudde & Kaltwasser, 2017).

Kutipan:

"Dengan kita bersama-sama, kita akan membangun Indonesia yang lebih adil dan makmur. Kita harus memastikan semua warga negara mendapatkan hak yang sama dan tidak ada yang tertinggal." (Bisnis, 2023).

Analisis:

Pernyataan ini pun mencerminkan karakteristik populisme dengan menekankan keadilan sosial dan kesetaraan. Anies berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang peduli terhadap seluruh rakyat, tidak hanya kelompok tertentu. Menurut teori populisme, pemimpin populis sering kali memanfaatkan retorika yang menyoroti kebutuhan untuk redistribusi keadilan dan kesempatan, sehingga dapat menarik dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat (Mudde & Kaltwasser, 2017).

2. Debat Capres 2024 Pertama:

Kutipan: Dalam debat pertama, Anies menggunakan retorika yang kuat untuk menarik perhatian publik. Ia menyampaikan pesan-pesan yang bersifat persuasif, menyoroti isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, dan menyatakan bahwa ia mendengar dan merespons kebutuhan rakyat kecil dengan serius (Tirto, 2023).

Analisis: Penggunaan bahasa yang emosional dan retorika yang membangkitkan semangat merupakan ciri khas dari narasi populis, di mana fokusnya adalah pada pemberdayaan rakyat biasa dan penghapusan ketidakadilan. Populisme berusaha untuk memobilisasi dukungan rakyat dengan menekankan perbedaan antara "rakyat" dan "elit" serta menyoroti kebutuhan mendesak untuk perubahan sosial (Taggart, 2000).

Kutipan:

"Kita harus mendengarkan suara rakyat kecil, mereka yang setiap hari bekerja keras namun sering kali terabaikan. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi nyata." (Tirto, 2023).

Analisis:

Narasi ini sangat populis karena Anies menekankan pentingnya perhatian kepada "rakyat kecil" dan menegaskan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam memperbaiki kondisi mereka. Dalam konteks populisme, retorika semacam ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemimpin populis adalah pembela rakyat biasa yang sering diabaikan oleh elit politik dan ekonomi (Taggart, 2000).

3. Dialog dengan Masyarakat di Rembang dan Pasuruan (Mei 2023):

Kutipan: Anies Baswedan sering kali menyebutkan nama-nama orang dari berbagai profesi yang ditemuinya, seperti Ibu Fitri yang mengelola TK di Rembang dan Bu Yuli, pemilik apotek di Pasuruan, untuk menunjukkan bahwa ia mendengar langsung keluhan dan aspirasi rakyat

"Saya bertemu dengan Ibu Fitri di Rembang yang mengelola TK dengan penuh dedikasi, dan Bu Yuli di Pasuruan yang berjuang menjalankan apotek kecilnya. Mereka adalah contoh nyata dari rakyat yang bekerja keras dan membutuhkan dukungan kita." (Republika, 2023).

Analisis: Menyebut nama-nama individu dan cerita mereka dalam kampanyenya menunjukkan bahwa Anies mendengarkan dan peduli terhadap cerita-cerita pribadi rakyat. Pendekatan ini memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan merupakan ciri khas populisme, di mana pemimpin berusaha menciptakan hubungan langsung dengan rakyat dan menempatkan dirinya sebagai wakil dari "suara rakyat" melawan elit yang dianggap tidak peduli (Canovan, 1999).

4. Debat Capres Kedua 2024

Kutipan: "Indonesia butuh perubahan. Ketika kita melihat angka kemiskinan yang masih tinggi, itu adalah tanda bahwa ada yang salah dalam cara kita mengelola negeri ini. Oleh karena itu, kita harus berani melakukan perubahan fundamental." Kutipan ini diambil dari debat capres kedua yang diadakan pada tahun 2024, di mana Anies Baswedan menyoroti masalah kemiskinan yang masih tinggi sebagai bukti kegagalan pengelolaan negara (Tirto.id, 2024).

Analisis: Kutipan ini mengandung elemen populis karena menyoroti masalah kemiskinan yang dialami masyarakat dan menghubungkannya dengan kegagalan pemerintah saat ini, yang menciptakan dikotomi antara "elite" dan "rakyat". Anies mengusung tema perubahan besar-besaran sebagai solusi untuk masalah yang kompleks, yang sering menjadi strategi populis untuk menarik dukungan rakyat dengan menawarkan solusi yang sederhana namun radikal terhadap masalah yang dihadapi. Teori populisme oleh Mudde dan Kaltwasser (2017) menjelaskan bahwa populisme sering muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan rakyat terhadap elite yang dianggap gagal memenuhi kebutuhan mereka (Mudde & Kaltwasser, 2017).

5. Debat Capres Ketiga 2024

Kutipan: "Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi. Karena itu, kita ingin mengembalikan." Pernyataan ini disampaikan oleh Anies dalam debat capres ketiga tahun 2024, di mana ia mengkritik ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi sumber daya dan keamanan negara (Tirto.id, 2024).

Analisis: Anies menggunakan narasi ini untuk menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi sumber daya negara dan keamanan siber. Dengan menyoroti masalah ini, ia menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap elite yang berkuasa, yang merupakan salah satu ciri khas retorika populis. Ia juga menekankan perlunya "mengembalikan" kontrol kepada rakyat, yang mengindikasikan bahwa pemerintah saat ini telah menyimpang dari mandat rakyat. Menurut teori populisme oleh Mudde dan Kaltwasser (2017), populisme sering kali menggunakan dikotomi "kita" versus "mereka" untuk memperkuat posisi pemimpin populis sebagai pembela rakyat melawan elite yang korup (Mudde & Kaltwasser, 2017).

Analisis Populisme dalam Kegiatan Kampanye "Desak Anies" dan "Selepet Imin"

Dalam konteks Pilpres 2024, Koalisi Perubahan telah meluncurkan dua inisiatif kampanye utama: "Desak Anies" dan "Selepet Imin". Keduanya bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan rakyat dan memperkuat narasi populis. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana kedua gerakan ini mencerminkan strategi populisme dalam politik modern.

a. Desak Anies

"Desak Anies" adalah kampanye yang menempatkan Anies Baswedan dalam

posisi di mana ia secara langsung mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat. Dalam setiap event, Anies dihadapkan pada pertanyaan dan permintaan langsung dari warga. Hal ini menciptakan kesan bahwa Anies adalah pemimpin yang dekat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kampanye ini mencerminkan prinsip populisme dengan menekankan peran aktif rakyat dalam proses politik. Menurut Mudde (2004), populisme menempatkan 'rakyat' sebagai entitas moral yang homogen dan menentang elite yang dianggap korup. Dengan Anies yang mendengarkan langsung dari rakyat, kampanye ini membangun narasi bahwa hanya pemimpin populis yang benar-benar memahami dan dapat merespons kebutuhan rakyat.

Selain itu, "Desak Anies" juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas, dua nilai yang sering diabaikan oleh elite politik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan popularitas Anies, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai antitesis dari elite yang terpisah dari realitas rakyat.

b. Selepet Imin

Selepet Imin difokuskan pada pemberdayaan ekonomi desa, penyelesaian masalah agraria, dan peningkatan kesejahteraan petani dan buruh. Muhaimin Iskandar (Imin) memimpin gerakan ini dengan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus dan menyoroti solusi konkret yang ditawarkan.

Strategi ini menunjukkan bentuk populisme yang lebih pragmatis dan solusional.

Berbeda dengan retorika populis yang sering kali hanya bersifat simbolik, "Selepet Imin" menawarkan tindakan nyata yang bertujuan untuk meningkatkan

kehidupan sehari-hari rakyat. Pendekatan ini sesuai dengan konsep populisme yang diuraikan oleh Laclau (2005), yang menekankan pentingnya membangun rantai ekivalensi antara berbagai tuntutan rakyat untuk menciptakan kesatuan politik yang lebih besar. Dengan fokus pada isu-isu konkret yang relevan bagi masyarakat pedesaan dan kelas pekerja, "Selepet Imin" memperkuat citra Imin sebagai pemimpin yang proaktif dan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Ini juga membedakan dirinya dari elite politik yang sering dianggap tidak peduli atau tidak efektif dalam menangani masalah-masalah mendesak yang dihadapi oleh rakyat.

Analisis kampanye "Desak Anies" dan "Selepet Imin" menunjukkan bagaimana Koalisi Perubahan menggunakan strategi populisme untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan rakyat dan memperkuat narasi pro-rakyat mereka. Dengan menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan menawarkan solusi konkret untuk masalah-masalah mereka, kedua kampanye ini berusaha membedakan diri dari elite politik dan menarik dukungan luas dalam Pilpres 2024. Strategi ini tidak hanya efektif dalam membangun popularitas tetapi juga dalam menciptakan kepercayaan dan loyalitas di antara pemilih.

Dampak Narasi Populis terhadap Dukungan Masyarakat dan Elektabilitas Partai

Penggunaan narasi populis oleh Anies Baswedan selama kampanye Pilpres 2024 terbukti memiliki dampak signifikan terhadap dukungan masyarakat dan elektabilitas partai-partai Koalisi Perubahan. Narasi yang menekankan pembelaan terhadap rakyat dan kritik terhadap elite pemerintahan menarik perhatian masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa populisme sering digunakan sebagai alat untuk memobilisasi pemilih yang merasa terpinggirkan atau tidak terwakili oleh elite politik (Mudde & Kaltwasser, 2017). Dalam konteks Pilpres 2024, Anies Baswedan berhasil memosisikan dirinya sebagai figur yang mewakili kepentingan rakyat,

yang kemudian meningkatkan dukungan publik terhadapnya dan partai-partai pengusungnya.

Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia pada Maret 2024 menunjukkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan mengalami peningkatan signifikan setelah kampanye populisnya mendapatkan perhatian luas (LSI, 2024). Hal ini sejalan dengan peningkatan dukungan terhadap partai-partai Koalisi Perubahan, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB, yang juga mengalami peningkatan dalam perolehan kursi legislatif.

Meskipun Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan tidak berhasil memenangkan Pilpres, partai-partai pengusungnya masih memperoleh keuntungan signifikan dalam perolehan kursi DPR dan DPRD. Keberhasilan partai-partai pengusung dalam meraih kursi legislatif ini memungkinkan mereka memiliki posisi tawar yang kuat dalam pemerintahan yang baru dan tetap dapat memperjuangkan agenda politik mereka.

Partai Nasdem memperoleh 69 kursi di DPR, naik dari periode sebelumnya yang mendapatkan 59 kursi. Di DPRD DKI, Nasdem mendapatkan 11 kursi, juga menunjukkan peningkatan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 53 kursi di DPR, yang juga mengalami peningkatan. Di DPRD DKI, PKS memperoleh 18 kursi, unggul dari PDIP dan Gerindra. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 68 kursi di DPR, menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya yang mendapatkan 58 kursi. Di DPRD DKI, PKB juga mengalami peningkatan dengan 10 kursi.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi politik mereka tetap efektif dalam mendapatkan dukungan masyarakat, yang diterjemahkan menjadi kekuatan legislatif yang signifikan.

Strategi Populisme: Antara Prinsip dan Pragmatisme di Pilpres Indonesia 2024

Partai Nasdem, yang dipimpin oleh Surya Paloh, menunjukkan tanda-tanda awal merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Menurut

analisis politik, langkah ini sudah terprediksi mengingat karakter pragmatis Paloh sebagai pebisnis yang mengutamakan keuntungan dan menghindari kerugian. Setelah pemilu, pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto semakin menguatkan indikasi ini (tirto.id, 2024).

PKB juga telah menunjukkan sinyal serupa dengan pertemuan antara Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto. Meski Muhaimin belum secara tegas menyatakan bergabung dengan pemerintahan baru, sinyal dukungan telah diberikan, menunjukkan kesiapan PKB untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Adapun PKS, meski memiliki riwayat sebagai partai oposisi, juga dilaporkan mempertimbangkan langkah serupa, walaupun belum ada pernyataan resmi (tirto.id, 2024).

Jika partai-partai dalam Koalisi Perubahan seperti Nasdem, PKS, dan PKB pada akhirnya bergabung dengan pemerintahan, hal ini dapat mengindikasikan bahwa mereka menggunakan isu populisme sebagai strategi pragmatis untuk menggali dukungan. Hanya sebatas strategi pragmatis dalam politik. Perubahan sikap dari mengkritik pemerintah menjadi bergabung dengan koalisi pemerintahan yang terpilih dapat menunjukkan bahwa isu populisme yang mereka angkat selama kampanye lebih merupakan alat politik daripada komitmen ideologis yang mendalam.

SIMPULAN

Diusungnya Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari partai Nasdem, PKS, dan PKB, meskipun Anies bukan kader partai, dapat diidentifikasi sebagai strategi politik yang cermat dari koalisi tersebut. Anies dikenal kuat dengan narasi populisme yang membelah masyarakat menjadi "rakyat" melawan "elite". Dengan memilih Anies, Koalisi Perubahan memanfaatkan popularitas dan daya tarik populisnya untuk meraih dukungan publik yang merasa tidak puas dengan pemerintahan saat ini. Strategi ini menunjukkan bagaimana partai politik dapat memilih figur non-kader yang memiliki potensi besar untuk memobilisasi pemilih dan meningkatkan elektabilitas partai.

Meski Anies Baswedan tidak memenangkan Pilpres 2024, partai-partai

pengusungnya tetap mendapatkan keuntungan signifikan dengan meningkatnya perolehan kursi legislatif. Keberhasilan ini meningkatkan daya tawar mereka dalam pemerintahan yang baru, memungkinkan mereka untuk mengamankan posisi dan kekuasaan. Partai-partai ini dapat memanfaatkan kursi legislatif yang diperoleh untuk menegosiasikan kebijakan dan posisi strategis dalam pemerintahan, sehingga tetap memiliki pengaruh politik yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi mengusung Anies Baswedan yang dekat dengan narasi populisme tidak hanya bertujuan untuk memenangkan pilpres, tetapi juga untuk memperkuat posisi partai dalam dinamika politik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Canovan, M. (1999). "Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy." *Political Studies*, 47(1), 2-16.
- Gerbaudo, P. (2018). *The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy*. Pluto Press.
- Gunawan, K. A., & Paramita, S. (2024). "Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik pada Media Online melalui Perspektif Identitas Sosial". *Koneksi*, 8(1), 132-141.
- Hunter, W., & Power, T. J. (2019). "Bolsonaro and Brazil's Illiberal Backlash." *Journal of Democracy*, 30(1), 68-82.
- Jagers, J., & Walgrave, S. (2007). "Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties' Discourse in Belgium." *European Journal of Political Research*, 46(3), 319-345.
- Kompas. (2024). "Pidato Kampanye Anies Baswedan di Jakarta, 15 Januari 2024". Kompas.
- Kompas. (2024). "Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo". Kompas.com. (2024). PKB Pertimbangkan Gabung Pemerintah Prabowo. [online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/28/pkb-pertimbangkan-gabung-pemerintah-prabowo> [Accessed 4 Jul. 2024]
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. Verso.
- LSI. (2024). "Hasil Survei Elektabilitas Anies Baswedan Maret 2024". Lembaga Survei Indonesia.
- Kompas. (2024). Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis.
- Kompas. (2024). "Pidato Kampanye Anies Baswedan di Jakarta, 15 Januari 2024". Kompas.
- Lim, M. (2017). "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies*.
- Liputan6. (2019). "Jokowi dan Cerita Anak Kampung Jadi Presiden". Liputan6.
- Marrietta, Lucia., & Sutrisno, Evi Lina. (2022). "Menjadi Pemimpin yang Ramah dan Peduli Rakyat : Melihat Populisme pada Anies Baswedan di Tengah Pandemi COVID-19". Universitas Gadjah Mada.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). "The Agenda-Setting Function of Mass Media." *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Moffitt, B. (2016). *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*. Stanford University Press.
- Mudde, C. (2004). "The Populist Zeitgeist." *Government and Opposition*, 39(4), 541-563.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Norris, P. (2020). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Nugroho, R. (2020). "Narasi Populisme dalam Kampanye Politik di Indonesia: Studi Kasus Jokowi dan Prabowo". *Jurnal Politik Indonesia*, 17(1), 45-60.
- Stanley, B. (2008). "The Thin Ideology of Populism." *Journal of Political Ideologies*, 13(1), 95-110.

- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Tempo. (2019). "Prabowo: Ekonomi Kita Harus Berdaulat!". Tempo.
- Tirto.id. (2024). Daftar Saling Serang Anies-Prabowo di Debat Capres Ketiga 2024. Diakses dari tirto.id.
- Tirto.id. (2024). Perolehan Kursi DPRD DKI 2024-2029: PKS Ungguli PDIP & Gerindra. Diakses dari tirto.id
- Tirto.id. (2019). "Retorika Populisme dalam Kampanye Pilpres 2019: Studi Kasus Prabowo Subianto". Tirto.id.
- Tirto.id. (2024). "Pidato Kampanye Prabowo Subianto di Surabaya, 10 Januari 2024". Tirto.id.
- Tirto.id. (2024). Nasdem Mendekat ke Prabowo-Gibran, Narasi Perubahan Cuma Gimik? [online] Available at: <https://tirto.id/nasdem-mendekat-ke-prabowo-gibran-narasi-perubahan-cuma-gimik> [Accessed 4 Jul. 2024].
- Tirto.id. (2024). "Perolehan Kursi DPRD DKI 2024-2029: PKS Ungguli PDIP & Gerindra". Tirto.id.
- Weyland, K. (2001). "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Saraswati, M. S. (2018). "Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*.
- Savitri, Nadya Dwi., dkk. (2023). "Bahasa Populis Dalam Kampanye Pemilu 2024: Analisis Terhadap Pidato Politik Terkini". *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(12), 1017-1023.
- Suaedy, A. (2014). "The role of volunteers and political participation in the 2012 Jakarta gubernatorial election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Study of Latin American Politics." *Comparative Politics*, 34(1), 1-22.
- Wibowo, T. (2020). "Populisme dalam Politik Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoretis." *Jurnal Politik Indonesia*, 15(2), 233-248.
- Yilmaz, I. (2023). "Competing Populisms, Digital Technologies and the 2024 Elections in Indonesia." ECPS.